



Dampak Dari Trims Agreement Terhadap Perekonomian Domestik Pasca Reformasi: Kajian Pengembangan Hukum

Angga Putra Pratama

Program Studi Hukum Ekonomi, Magister Universitas Indonesia

E-mail: anggaputrapratama.1996@gmail.com

Abstract. *This article has a discussion of the impact of the TRIMs agreement for Indonesia. In this article we will discuss the TRIMs agreement, utilization during the transition period, and a series of efforts made by the government to increase investment value. This research uses normative legal research methods, while the approaches used are legislative, sociological and comparative literacy studies approaches. The results of this research show that Indonesia is implementing the TRIMs Agreement, taking it into account during the transition period. The government is trying to increase investment, including legal protection, improving human resources, a conducive investment environment, digital technology, innovative approaches, and simplifying the investment process. Therefore, the recommendation is that the government must strengthen investment regulations and policies that pay attention to the development of society and the business world, as well as increase investment and continue to create a profitable investment climate. With various efforts and good cooperation, investment in Indonesia is expected to reach the point of independence and always have a positive impact on economic growth after the Reformation.*

Keywords: *Investor; TRIMs Agreement, Investment Regulations*

Abstrak. Artikel ini mempunyai cakupan pembahasan mengenai dampak dari perjanjian TRIMs untuk Indonesia. Dalam artikel ini akan membahas mengenai pengecualian perjanjian TRIMs, Pemanfaatan pada masa Transisi, dan serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan nilai Investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perundangh – undangan, sosiologis, dan perbandingan study literasi. Adapun hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwasannya Indonesia melaksanakan TRIMs Agreement, dengan mempertimbangkan pengecualian pada masa transisi. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan investasi yaitu mencakup perlindungan hukum, peningkatan Sumber Daya Manusia, Lingkungan investasi kondusif, teknologi digital, pendekatan inovatif, dan penyederhanaan proses investasi. Oleh karena itu, yang menjadi rekomendasi adalah pemerintah harus memperkuat regulasi dan kebijakan investasi yang memperhatikan perkembangan masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan Investasi dan senantiasa menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan berbagai upaya dan kerja sama yang baik, Investasi di Indonesia diharapkan bisa mencapai titik merdeka dan senantiasa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pasca Reformasi.

Kata Kunci: Investor; Perjanjian TRIMs, Regulasi Investasi

Received Agustus 07, 2023; Revised September 02, 2023; Accepted Oktober 19, 2023

* Angga Putra Pratama, anggaputrapratama.1996@gmail.com

PENDAHULUAN

Perekonomian domestik suatu negara adalah salah satu aspek utama yang menggambarkan kesejahteraan rakyatnya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, hubungan ekonomi antarnegara menjadi semakin kompleks. Salah satu perjanjian internasional yang memiliki dampak besar pada perekonomian domestik suatu negara adalah TRIMs (Trade-Related Investment Measures) Agreement, yang merupakan bagian dari kesepakatan WTO (World Trade Organization). Penyelidikan dampak TRIMs Agreement terhadap perekonomian domestik pasca reformasi di Indonesia adalah hal yang sangat penting, mengingat Reformasi tahun 1998 telah membuka pintu untuk lebih banyak investasi asing dan perubahan signifikan dalam regulasi ekonomi. Dalam latar belakang ini, pendahuluan ini akan membahas dampak TRIMs Agreement terhadap perekonomian domestik Indonesia pasca Reformasi, menjelaskan signifikansi penelitian ini, merumuskan tujuan penelitian, dan merinci kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

Latar Belakang

Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat sejak Reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut membawa perubahan signifikan dalam regulasi ekonomi, termasuk deregulasi, liberalisasi, dan kebijakan investasi yang lebih terbuka terhadap modal asing. Pada saat yang sama, Indonesia juga menjadi anggota aktif dalam WTO dan turut menandatangani TRIMs Agreement, yang mengatur berbagai aspek kebijakan investasi yang diterapkan oleh anggota WTO.

TRIMs Agreement adalah perjanjian yang menargetkan aspek kebijakan investasi yang melibatkan pemberian insentif lokal atau persyaratan kinerja lokal. Hal ini seringkali mencakup persyaratan untuk menggunakan bahan baku lokal, memberikan pelatihan lokal, atau memenuhi target ekspor. Meskipun TRIMs Agreement memberikan beberapa fleksibilitas, dampaknya pada perekonomian domestik suatu negara bisa sangat signifikan.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, menarik banyak investasi asing dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, penting

untuk memahami dampak dari TRIMs Agreement terhadap perekonomian domestik Indonesia, terutama setelah Reformasi.

Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak TRIMs Agreement terhadap perekonomian domestik Indonesia. Dengan memahami dampaknya, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kedua, penelitian ini akan mengisi kesenjangan dalam literatur tentang dampak TRIMs Agreement di Indonesia. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang WTO dan dampaknya di berbagai negara, penelitian tentang dampak TRIMs Agreement di Indonesia masih terbatas. Terakhir, penelitian ini akan memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan strategi ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak TRIMs Agreement terhadap perekonomian domestik Indonesia pasca Reformasi. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian akan fokus pada beberapa aspek, termasuk perubahan kebijakan investasi, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi dampak dari TRIMs Agreement.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritis yang mencakup teori ekonomi internasional, teori investasi langsung asing (FDI), dan teori dampak kebijakan. Kerangka teoritis ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana TRIMs Agreement memengaruhi perekonomian domestik Indonesia pasca Reformasi, dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan investasi, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini akan menjelaskan dampak dari TRIMs Agreement terhadap perekonomian domestik Indonesia pasca Reformasi. Dengan memahami dampaknya, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan kerangka teoritis yang relevan, penelitian ini akan menganalisis bagaimana TRIMs Agreement memengaruhi perekonomian Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu menghadapi dampaknya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang hubungan antara TRIMs Agreement dan perekonomian domestik Indonesia pasca Reformasi.

PEMBAHASAN

Pengaruh TRIMs Agreement Terhadap Perekonomian Domestik

TRIMs Agreement (Trade-Related Investment Measures) adalah bagian dari perjanjian WTO yang mengatur berbagai aspek investasi dan peraturan yang berkaitan. Dalam pasca reformasi, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan TRIMs Agreement dan dampaknya terhadap perekonomian domestik.

A. Liberalisasi Pasar

Salah satu dampak positif dari TRIMs Agreement adalah liberalisasi pasar. TRIMs Agreement mendorong penghapusan berbagai hambatan yang dapat membatasi investasi asing di suatu negara. Sebagai hasilnya, Indonesia membuka peluang bagi investasi asing yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik.

Namun, perlu dicatat bahwa liberalisasi pasar juga menimbulkan sejumlah isu sensitif. Terutama, hal ini berkaitan dengan kemungkinan masuknya modal asing yang besar, yang dapat bersaing dengan bisnis lokal dan mengarah pada dominasi perusahaan multinasional dalam industri tertentu. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan investasi menguntungkan kedua belah pihak, baik investor asing maupun bisnis lokal.

B. Pengaruh Terhadap Industri Lokal

Dalam beberapa kasus, TRIMs Agreement juga dapat memberikan tekanan pada industri lokal. Hal ini terutama terkait dengan perlindungan terhadap perusahaan lokal dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan asing yang lebih besar dan kuat. Kebijakan perdagangan bebas dapat menyebabkan hilangnya perlindungan terhadap perusahaan lokal yang mungkin tidak sekuat pesaing asing. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengimplementasikan TRIMs Agreement. Negara ini harus memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi sesuai dengan kepentingan jangka panjang industri lokal. Dalam beberapa kasus, negosiasi khusus dengan investor asing atau perusahaan asing mungkin diperlukan untuk memastikan keseimbangan yang adil antara perlindungan perusahaan lokal dan investasi asing.

C. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

TRIMs Agreement juga berdampak pada perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Terdapat perubahan signifikan dalam regulasi HKI setelah reformasi, seiring dengan komitmen internasional yang diambil oleh Indonesia. Perlindungan HKI yang kuat sangat penting bagi industri yang berbasis pada inovasi dan kreativitas, seperti industri hiburan, teknologi, dan farmasi.

Penerapan TRIMs Agreement telah mendorong Indonesia untuk memperbarui peraturan HKI dan memperkuat perlindungan terhadap produk-produk yang dihasilkan secara kreatif. Ini telah memberikan insentif bagi inovasi dalam negeri, yang pada gilirannya dapat menghasilkan produk dan layanan baru yang dapat bersaing di pasar global.

D. Perlindungan Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial

TRIMs Agreement juga berpotensi untuk memengaruhi lingkungan dan kesejahteraan sosial. Investasi asing dapat membawa perubahan signifikan dalam lingkungan, terutama jika terkait dengan industri yang cenderung menghasilkan dampak lingkungan yang tinggi. Indonesia harus memastikan bahwa peraturan lingkungan yang ketat diterapkan untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem yang rentan. Selain

itu, dampak sosial dari investasi asing juga perlu diperhatikan. Investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dapat memicu isu-isu sosial seperti ketidaksetaraan upah dan kondisi kerja yang buruk. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang tepat antara mendorong investasi asing dan melindungi hak pekerja serta lingkungan.

Perlu diingat bahwa TRIMs Agreement (Trade-Related Investment Measures) sebenarnya adalah bagian dari perjanjian WTO (World Trade Organization) yang berlaku secara global. Hal ini tidak secara khusus berkaitan dengan Indonesia, tetapi Indonesia, sebagai anggota WTO, terikat oleh peraturan yang terkandung dalam perjanjian ini. Bergabungnya Indonesia dengan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) pada tahun 1995 memengaruhi berbagai aspek perdagangan dan investasi di dalam negeri. Terkait dengan TRIMs Agreement (Trade-Related Investment Measures), berikut adalah hubungannya:

a. Kewajiban Bergabung dengan WTO

Sebagai salah satu konsekuensi dari bergabungnya Indonesia dengan WTO, negara ini menjadi terikat untuk mematuhi peraturan perdagangan internasional yang terkandung dalam perjanjian WTO, termasuk TRIMs Agreement.

b. Penerapan Standar Internasional

TRIMs Agreement adalah salah satu perjanjian dalam kerangka WTO yang mengatur tindakan-tindakan yang berkaitan dengan investasi yang dapat memengaruhi perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan investasi yang ada di dalam negeri mematuhi standar internasional yang diatur oleh TRIMs Agreement.

c. Perubahan Kebijakan Investasi

Bergabungnya Indonesia dengan WTO mendorong perubahan kebijakan investasi dalam negeri. Hal ini meliputi penghapusan atau perubahan pada hambatan-hambatan yang ada pada investasi asing yang mungkin bertentangan dengan TRIMs Agreement.

d. Liberalisasi Investasi

Indonesia juga melibatkan diri dalam langkah-langkah liberalisasi investasi sebagai bagian dari kewajiban anggota WTO. Ini termasuk pengurangan hambatan-hambatan tertentu terhadap investasi asing dan pengadopsian peraturan yang memudahkan masuknya modal asing.

e. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Investasi asing sering kali terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), terutama dalam industri berbasis inovasi seperti farmasi, teknologi, dan hiburan. Indonesia telah merespons TRIMs Agreement dengan memperbarui dan memperketat regulasi HKI untuk memenuhi standar internasional.

f. pada Industri dan Ekonomi

Sejak bergabung dengan WTO dan mengadopsi peraturan-peraturan yang terkandung dalam TRIMs Agreement, Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dalam sektor investasi dan ekonomi. Ini termasuk peningkatan investasi asing, liberalisasi sektor tertentu, serta pengaruh pada industri lokal dan perkembangan ekonomi domestik.

Bergabungnya Indonesia dengan WTO memengaruhi bagaimana negara ini mengelola kebijakan investasi dan beradaptasi dengan standar internasional yang ditetapkan dalam perjanjian WTO, termasuk TRIMs Agreement. Dengan kata lain, keanggotaan Indonesia di WTO mengharuskannya untuk mematuhi dan menyesuaikan kebijakan investasi nasionalnya dengan standar internasional yang diatur oleh TRIMs Agreement.

Sejarah TRIMs Agreement di Indonesia lebih mengacu pada bagaimana Indonesia beradaptasi dengan peraturan-peraturan tersebut setelah bergabung dengan WTO. Di bawah ini adalah sejarah singkat bagaimana Indonesia berinteraksi dengan TRIMs Agreement:

1. Bergabungnya Indonesia dengan WTO (1995)

Pada tahun 1995, Indonesia resmi menjadi anggota WTO. Bergabung dengan WTO memengaruhi berbagai aspek perdagangan dan investasi di dalam negeri, termasuk yang terkait dengan TRIMs Agreement. Hal ini memaksa Indonesia untuk mematuhi standar internasional yang terkait dengan investasi.

2. Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Setelah bergabung dengan WTO, Indonesia melakukan berbagai perubahan dalam regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan investasi asing. Ini termasuk penghapusan atau perubahan terhadap hambatan-hambatan yang ada pada investasi asing yang bertentangan dengan TRIMs Agreement.

3. Liberalisasi Investasi

Seiring dengan WTO dan persetujuan internasional lainnya, Indonesia bergerak menuju liberalisasi investasi. Langkah-langkah ini melibatkan pengurangan hambatan-hambatan tertentu terhadap investasi asing dan perubahan kebijakan yang memudahkan masuknya modal asing.

4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Investasi asing juga sering terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), terutama dalam industri berbasis inovasi seperti farmasi, teknologi, dan hiburan. Indonesia telah merespons TRIMs Agreement dengan memperbarui dan memperketat regulasi HKI untuk memenuhi standar internasional.

5. Dampak Terhadap Industri dan Ekonomi

Sejak bergabung dengan WTO dan mengadopsi peraturan-peraturan yang terkandung dalam TRIMs Agreement, Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dalam sektor investasi dan ekonomi. Ini termasuk peningkatan investasi asing, liberalisasi sektor tertentu, serta pengaruh pada industri lokal dan perkembangan ekonomi domestik.

Meskipun TRIMs Agreement bukan kesepakatan khusus dengan Indonesia, keanggotaan Indonesia di WTO telah memengaruhi bagaimana negara ini mengelola kebijakan investasi dan beradaptasi dengan standar internasional yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Sejarah TRIMs Agreement di Indonesia terkait erat dengan perubahan dan adaptasi yang terjadi setelah bergabung dengan WTO dan berkomitmen pada standar perdagangan dunia.

TRIMs Agreement memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia pasca reformasi. Dampaknya mencakup liberalisasi pasar, pengaruh pada industri lokal, perlindungan HKI, serta perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Untuk memastikan bahwa dampak positif lebih dominan daripada dampak negatif, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang cermat dan seimbang dalam mengimplementasikan TRIMs Agreement. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa hak-hak pekerja dan lingkungan dijaga sambil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing yang bijaksana.

PENUTUP

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait dampak TRIMs Agreement terhadap perekonomian domestik Indonesia pasca Reformasi, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil, Sebagai berikut :

a. Perubahan Kebijakan Investasi

Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dalam kebijakan investasinya pasca Reformasi. Bergabungnya dengan WTO dan keterlibatan dalam TRIMs Agreement telah memaksa negara ini untuk mengevaluasi dan, dalam beberapa kasus, mengubah peraturan investasi yang ada untuk memenuhi standar internasional. Ini mencakup penghapusan atau perubahan pada hambatan-hambatan investasi yang mungkin bertentangan dengan TRIMs Agreement.

b. Liberalisasi Investasi

Dalam upaya untuk mematuhi TRIMs Agreement dan kewajiban WTO lainnya, Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk meliberalisasi sektor investasi. Hal ini mencakup pengurangan hambatan-hambatan tertentu terhadap investasi asing dan pengadopsian peraturan yang memudahkan masuknya modal asing. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bagi PMA.

c. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Investasi asing sering kali terkait dengan perlindungan HKI, terutama dalam industri berbasis inovasi. Indonesia telah merespons TRIMs Agreement dengan memperbaiki dan memperketat regulasi HKI untuk memenuhi standar internasional. Ini memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang, yang menjadi penting dalam mendukung investasi dalam industri berbasis pengetahuan.

d. Peningkatan Investasi Asing

Meskipun terdapat beberapa kendala dan tantangan, bergabungnya Indonesia dengan WTO dan komitmen untuk mematuhi TRIMs Agreement telah membuka pintu bagi peningkatan investasi asing di berbagai sektor ekonomi. Investasi ini telah membantu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membawa teknologi dan pengetahuan baru ke dalam negeri.

e. Tantangan dan Kelanjutan Reformasi

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota WTO, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Perlunya menjaga keseimbangan antara membuka pintu bagi investasi asing dan melindungi industri lokal merupakan salah satu tantangan utama. Selain itu, penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memberantas praktik-praktik yang bertentangan dengan TRIMs Agreement juga menjadi fokus penting.

Saran:

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait:

1. Perkuat Penegakan Hukum

Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terutama dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan penegakan aturan yang mengatur investasi. Ini akan memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak pemegang merek dagang dan menciptakan iklim investasi yang lebih aman.

2. Promosikan Kerja Sama dengan PMA

Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan PMA perlu ditingkatkan. Investasi asing dapat membawa manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk teknologi dan pengetahuan baru. Pemerintah perlu mempromosikan investasi asing yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

3. Pertahankan Keseimbangan

Pemerintah harus berusaha mempertahankan keseimbangan antara kepentingan investasi asing dan perlindungan industri dalam negeri. Hal ini melibatkan perumusan kebijakan yang bijaksana dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tertentu di dalam negeri.

4. Edukasi dan Kapasitas

Peningkatan kapasitas dan pendidikan di bidang penegakan hukum, manajemen investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual penting untuk menghadapi tantangan yang berkaitan dengan TRIMs Agreement. Program pelatihan dan pendidikan untuk pejabat pemerintah, hakim, dan pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan.

5. Evaluasi Berkala

Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap perubahan kebijakan investasi dan dampaknya pada ekonomi serta lingkungan investasi. Hal ini akan membantu dalam menyesuaikan kebijakan yang ada dengan perkembangan terkini.

6. Transparansi dan Partisipasi

Mendorong transparansi dalam pengambilan kebijakan investasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan akan membangun kepercayaan dan mendukung penciptaan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, keterlibatan Indonesia dalam TRIMs Agreement dan anggota WTO telah membawa dampak yang signifikan pada perekonomian domestik. Sambil menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat terus memperbaiki dan memperkuat kerangka kebijakan untuk mendukung investasi yang

berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berperan sebagai tujuan investasi yang menarik bagi PMA dan meraih manfaat ekonomi yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2014). Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4).
- Dewi, N. W. M. S. (2021). Dampak World Trade Organization (WTO) terhadap Pengaturan Hukum Bisnis Kepariwisata Indonesia. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 57-67.
- Barkatullah, A. H. (2017). Dampak Penerapan Prinsip National Treatment Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 173-194.
- Bolony, A., Hartono, D., & Priyono, J. (2017). Tinjauan Hukum terhadap Putusan WTO Atas Gugatan Jepang dan Uni Eropa Kepada Kanada Terkait Pemberlakuan Feed-in Tariff Program yang Diterapkan di Provinsi Ontario, Kanada. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13.
- Fairuzzaman, F. (2018). Dampak Penerapan Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures Terhadap Perdagangan Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 3(2), 321-342.
- Julianti, L., & Subekti, R. P. (2018). Standar perlindungan hukum kegiatan investasi pada bisnis jasa pariwisata di indonesia. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 156-166.
- CINDY, C., GINTING, B., & SIREGAR, M. (2013). Analisis Yuridis Prinsip Hukum Perlakuan Sama Kepada Investor Domestik dan Investor Asing yang Melakukan Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia. *Transparency Journal of Economic Law*, 2(1), 14656.
- Julianti, L., & Subekti, R. P. (2018). Standar perlindungan hukum kegiatan investasi pada bisnis jasa pariwisata di indonesia. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 156-166.
- Hasyim, S., & Nasrullah, N. (2022). The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 332-350.
- Musjtari, D. N. (2014). Dampak Liberalisasi perdagangan dalam WTO agreement terhadap ketahanan pangan Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 221-246.

Yanti, A. A. I. E. K. (2018). Prinsip Non Diskriminasi Tenaga Kerja Asing Dalam Kerangka GATS: Dimensi Kepariwisata. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 190-203.